



HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI KAMIS, 30 MEI 2024



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

@lenteratoday

@lenteratoday

lentera.tv

Lentera TV Media

MENANTI BABAK AKHIR KORUPSI TIMAH

MENCUAT INSIAL 'B' PURNAWIRAWAN POLRI, MANTAN DIRJEN MINERBA JADI TERSANGKA BARU



**Government (Hal.2)
Ternyata Ada Sanksi
Bagi Penolak Tapera
Menko Airlangga:
Pahami
Keuntungannya**

Kejaksanaan Agung (Kejagung) dalam sorotan. Bak membalas keraguan publik, usai peristiwa penguntitan yang dilakukan anggota Densus 88 Antiteror Polri terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, gebrakan terhadap kasus dugaan korupsi timah langsung digeber. Terbaru, Kejagung menetapkan satu orang sebagai tersangka sehingga total tersangka kini menjadi 22 orang. Satu orang yang baru ditetapkan menjadi tersangka adalah mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono. Bbang langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung dengan dugaan secara sengaja mengubah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada tahun 2019. Tak hanya itu, setelah dihitung kembali kerugian negara membengkak dalam korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Bangka pada 2015 hingga 2022 ini. Semula diperkirakan Rp 271 triliun, ternyata mencapai Rp 300 triliun. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tegas mengatakan, kasus ini memasuki babak akhir. Rakyat tunggu hasil baiknya.

Baca di hal 11....

Konferensi Pers Jaksa Agung RI dan Kepala BPKP di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/2024). Foto: Dok. Istimewa

TERSANGKA PERINTANGAN PENYIDIKAN:

- Toni Tamsil alias Akhi (TT)

TERSANGKA POKOK PERKARA:

- Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung
- MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP
- Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP

- Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP
- Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP
- Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP
- Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS
- Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN
- Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT
- Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT

- Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011
- Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018
- Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah
- Helena Lim (HLN) selaku Manajer PT QSE
- Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT
- Hendry Lie (HL) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN

BERIKUT DAFTAR TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI TATA NIAGA TIMAH DI IUP PT TIMAH 2015-2022:

- Fandy Lie (FL) selaku marketing PT TIN sekaligus adik Hendry Lie
- Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019
- Rusbani (BN) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019
- Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung
- Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono.

Ternyata Ada Sanksi Bagi Penolak Tapera Menko Airlangga: Pahami Keuntungannya

Ragam Potongan Gaji Para Pekerja Swasta Saat Ini

1. BPJS Kesehatan

Pekerja/Pegawai Pekerja/Pegawai yang menerima gaji upah yaitu sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Misal gaji Rp 5.067.381 per bulan dipotong Rp50.674 untuk iuran BPJS Kesehatan.

2. BPJS Ketenagakerjaan JHT

Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) juga ditanggung oleh karyawan. Besar potongan adalah 2% dari gaji bulanan. Artinya dengan gaji Rp 5.067.381 per bulan karyawan harus membayar Rp 101.348

3. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun

Selain Jaminan Hari Tua, ada juga iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP). Besarnya 3% untuk ditanggung oleh perusahaan dan karyawan. Perusahaan membayar 2% BPJS Ketenagakerjaan JP, sedangkan 1% diambil dari gaji bulanan karyawan. Jadi dengan gaji Rp 5.067.381 per bulan dipotong Rp50.674 untuk iuran JP.

4. Pajak Penghasilan PPh 21

Salah satu komponen utama yang menjadi pemotong gaji karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21. Pajak penghasilan 21 adalah pajak yang wajib dikenakan baik pada perseorangan maupun badan yang memiliki penghasilan.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann (kanan) saat konferensi pers 'Workshop Tim Nasional OECD' di Jakarta, Rabu (29/5/2024) (ANTARA)

Penyelenggaraan Tapera.

Pasal 5 menyebutkan peserta Tapera harus berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah ketika mendaftar. Selain itu, pekerja harus mempunyai penghasilan setiap bulan minimal sebesar upah minimum. Namun, ketentuan upah minimum dapat dikecualikan bagi pekerja mandiri.

Setoran simpanan peserta adalah sebesar 3 persen dari gaji, upah, atau penghasilan per bulan. Pembayaran bagi pekerja ditanggung bersama pengusaha sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen melalui pemotongan gaji atau upah. Sementara iuran bagi freelancer ditanggung dirinya sendiri.

"Pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera," bunyi Pasal 20 ayat (2) PP yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut.

Pasal 55 menegaskan bahwa pekerja mandiri yang melanggar ketentuan terkait kewajiban menjadi peserta akan dikenai sanksi peringatan tertulis oleh Badan Pengelola (BP) Tapera. Peringatan tertulis diberikan sebanyak dua kali dengan jangka waktu masing-masing sepuluh hari kerja.

Sementara sanksi administratif bagi pengusaha lebih beragam, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, memublikasi ketidakpatuhan pemberi kerja, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha. Untuk besaran denda administratif yang dikenakan sebesar 0,1 persen setiap bulan dari simpanan yang wajib dibayarkan.

"Denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sebesar 0,1 persen setiap bulan dari simpanan yang seharusnya dibayar, yang dihitung sejak peringatan tertulis

kedua berakhir," tulis Pasal 56 ayat (2) huruf d PP tersebut.

Kekhawatir Buat Bancakan

Indonesia Property Watch (IPW) menyoroti rencana pemotongan gaji karyawan swasta untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera sebesar 3%. Selain nilai yang dipangkas cukup besar, IPW khawatir ada penggelapan dana investasi tersebut.

"Tapera itu prinsipnya bagus, bisa jadi dana abadi, perumahan gitu ya, yang saya khawatirkan dan menjadi konsen kita, ini jadi kontrol bersama, masalah pengelolaannya," ujar Ali saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).

"Jangan sampai tidak transparan, itu yang saya khawatirkan," paparnya.

Dalam struktur Dewan Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) belum ada wakil dari konsumen atau para pekerja. Sehingga, kontrol atas pengelolaan anggaran tidak dapat dilakukan secara langsung.

"Kenapa, pertama di Dewan Tapera itu belum ada wakil, belum ada wakil konsumen, gimana kita konsumsi tahu untuk dananya itu bisa transparan digunakan karena dananya luar biasa lho, dana jumbo itu," beber dia.

Ali juga mempertanyakan siapa yang bakal bertanggung jawab, bila investasi dana Tapera gagal. Pertanyaan ini beralasan lantaran fund manager atau manajer investasi selaku pengelola tidak bertanggung jawab atas kegagalan yang dimaksudkan.

"Kedua, masalah pengelolaan uangnya itu akan diserahkan ke fund manager sebagian, fund manager itu pasti ada fee di sana, fee-nya itu jangan jadi dana bancakan, terus juga ketika fund manager mengelola kemudian rugi investasinya itu yang tanggung siapa?," tanyanya.

"Karena di undang-undang pasar modal tidak ada yang bisa

menyalahkan fund manager kalau rugi, itu yang tanggung masyarakat nanti. Nah itu pertanggung jawabnya gimana nanti Tapera," jelasnya.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi menilai pengelolaan dana Tapera harus transparan dan perlu pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen risiko dalam pengelolaan juga perlu diperhatikan agar kasus Jiwasraya dan Asabri tidak terulang kembali.

Termasuk juga penekanan kepada manajer investasi pada BP Tapera yang diberi tugas mengelola dan mengembangkan dana Tapera harus berintegritas, transparan dan akuntabel dan diawasi secara ketat.

"Hal ini diperlukan agar dana Tapera tidak mengalami penyalahgunaan seperti pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Dan tidak dimasukkan dalam proyek-proyek yang berisiko tinggi seperti proyek IKN atau jangan sampai dialokasikan ke program pemerintah lainnya," ujar Suryadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/5/2024).

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kubu Juhur Hidayat ikut menyoroti kebijakan pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat alias Tapera. Ketua Umum DPP KSPSI Juhur Hidayat mengatakan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera memaksa buruh dan pengusaha untuk melakukan iuran setiap bulan.

Dia menyebut, kebijakan ini lebih banyak merugikan bagi buruh. Sebab, uang buruh bahkan pengusaha akan mengendap hingga usia 58 tahun. "Pemerintah ini senangnya ngumpul duit rakyat, terus dari duit itu digoreng-goreng dalam berbagai instrumen investasi," kata Juhur dalam keterangan resminya pada Selasa, 28 Mei 2024.

Dia pun mengungkit kasus korupsi hingga perusahaan asuransi pelat merah Asabri dan Jiwasraya yang mencapai belasan hingga puluhan triliun rupiah. Belum lagi, kata Juhur, dana BPJS Ketenagakerjaan yang sempat rugi walau disebut unrealized loss.

Juhur melanjutkan, dana iuran Tapera dikumpulkan sebesar 2,5 persen dari gaji buruh dan 0,5 persen dari pengusaha. Dengan rata-rata upah di Indonesia Rp 2,5 juta dan 58 juta pekerja formal, dia menilai akan terkumpul dana sekitar Rp 50 triliun setiap tahunnya untuk dikelola oleh BP Tapera.

"Ini dana yang luar biasa besar dan pastinya menjadi bancakan para pengusaha dengan cara digoreng-goreng di berbagai instrumen investasi," tutur Juhur. (wid,rls, ist/dya)

JAKARTA-Kritik atas pemotongan gaji karyawan sebesar 3 persen untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera makin menguat. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengomentari hal itu dengan menegaskan aturan masih akan disosialisasikan.

"Masyarakat harus paham dulu aturannya," ujar Airlangga di kantornya, Rabu (29/5/2024).

Ia mengatakan perlu melihat manfaat apa yang bisa diperoleh para pekerja dengan penetapan pemotongan iuran Tapera. "Perlu dilihat benefit apa yang bisa diperoleh para pekerja terkait perolehan perumahan maupun renovasi perumahan," ujarnya.

Menurut Airlangga pemahaman soal benefit dari iuran Tapera ini mesti disosialisasikan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Sehingga masyarakat bisa memahami keuntungan yang bisa didapat.

Setiap pekerja dan pekerja mandiri (freelancer) yang memenuhi persyaratan wajib menjadi peserta program tabungan perumahan rakyat (Tapera). Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Jelang Putusan Pelanggaran Etik Keempat Hasyim Asyari DKPP: Penyelenggara Pemilu yang Kena Sanksi Berat Bisa Diberhentikan

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI, Hedy Ligitto, mengatakan penyelenggara pemilu yang memperoleh sanksi pelanggaran berat dapat diberhentikan.

"Kalau pelanggarannya berat ya sampai diberhentikan. Kalau pelanggarannya ringan, ya peringatan saja," kata Hedy dikutip Rabu (29/5/2024).

Namun Hedy menuturkan DKPP tidak mengukur pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, melainkan pelanggaran yang diadakan.

Karena itu, pihaknya akan berfokus pada pokok perkara aduan untuk menjadi acuan dalam memutus sanksi kepada penyelenggara pemilu. "Jadi tidak melebar ke mana-mana, khusus di itu saja," ujarnya.

Sebelumnya, sanksi jera yang diberikan DKPP kepada penyelenggara pemilu sempat dipertanyakan. Pada 2023-2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hasyim Asy'ari telah tiga kali secara beruntun diberikan sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP.

Hedy pun kembali menegaskan putusan DKPP diukur berdasarkan pokok perkara yang diadakan.

"Ya, karena kami memutuskan berdasarkan pokok perkara yang diadakan pada waktu itu kan, tingkat derajatnya kami ukur dari itu," ujar Hedy.

"Memang publik bertanya-tanya, ini DKPP memberi peringatan terakhir, kapan berakhirnya? Ya, kalau memang sanksinya cuma di tingkat peringatan terakhir, ya mau apa lagi?" Kata dia menambahkan.

Tiga sanksi sebelumnya telah dijatuhkan DKPP kepada Hasyim atas beberapa perkara. Pertama, pada April 2023, ihwal kedekatan Hasyim secara pribadi dengan tersangka kasus korupsi sekaligus Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein.

Kedua, pada Oktober 2023, Hasyim dijatuhi sanksi karena aturan soal keterwakilan calon anggota legislatif perempuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Ketiga, pada Februari 2024, Hasyim diberi sanksi serupa karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum lantaran menunda revisi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 ketika pendaftaran capres-cawapres sudah berlangsung.



Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hedy Ligitto

Panggil Sopir di Kasus Asusila

Saat ini, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kembali menjalani sidang etik. Hasyim diadukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) atas dugaan melakukan tindakan asusila.

DKPP RI akan memanggil sopir Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari untuk memberikan keterangan dalam sidang etik dugaan asusila terhadap penyelenggaraan pemilu luar negeri (PPLN) pada Kamis, (6/6/2024).

"DKPP akan memanggil mereka, misalnya, sopir, juga siapa lagi, sekjen, karena ada beberapa yang harus didalami," kata Ketua DKPP RI Hedy Ligitto.

"Kan ada beberapa perjalanan, ada apa, ada ini, ada itu, kan harus kami verifikasi," sambungnya.

Sebelumnya, dalam sidang perdana, pihak terkait dari KPU RI, baik anggota Betty Epsilon Idroos maupun kesekretariatan jenderal hanya melampirkan keterangan tertulis alih-alih hadir dalam persidangan.

Hedy mengatakan dalam sidang perdana itu, terdapat beberapa data baru sehingga majelis pemeriksa DKPP merasa perlu untuk mengonfirmasi dan melakukan tanya-jawab secara langsung.

"Jadi, kesaksian atau keterangan tertulis itu tidak cukup karena kita mesti mengonfirmasi beberapa hal. Biar semuanya jadi terang-benderang. Mereka harus hadir di persidangan, karena beberapa keterangan tertulis itu harus kita konfirmasi," ujar Hedy.

"Jadi, ada data-data baru yang harus kita verifikasi ke sekretariat KPU, termasuk ke sekjen dan beberapa

pegawai yang lain, 3 orang pegawai yang lain. Saya kira itu saja karena ada data-data baru," tambahnya.

Hasyim Asy'ari dilaporkan ke DKPP RI pada 18 April 2024 oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Kuasa hukum korban Maria Dianita Prosperianti menjelaskan bahwa perbuatan Hasyim sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Maria mengatakan bahwa dalam pelaporan ke DKPP RI terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan pelanggaran kode etik oleh Hasyim.

Ia menyebut Hasyim mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya.

"Sudah ada beberapa belasan bukti, ya, seperti screenshot (tangkapan layar) percakapan, foto, dan video, serta juga bukti-bukti. Tadi sudah saya jelaskan, bukti ini bisa menunjukkan benar-benar yang terstruktur, sistematis, dan aktif, dan di sini juga teradu juga memberikan manipulasi informasi serta juga menyebarkan informasi rahasia untuk menunjukkan kekuasaannya," tutur dia.

Ia juga mengatakan bahwa perbuatan Hasyim terhadap korban menunjukkan adanya perbuatan yang berulang. Oleh sebab itu, dia berharap DKPP RI tidak hanya memberikan peringatan keras untuk kasus yang

TIGA SANKSI YANG TELAH DIJATUHKAN DKPP KEPADA KETUA KPU HASYIM ASYARI

Pertama, pada April 2023, ihwal kedekatan Hasyim secara pribadi dengan tersangka kasus korupsi sekaligus Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein.

Kedua, pada Oktober 2023, Hasyim dijatuhi sanksi karena aturan soal keterwakilan calon anggota legislatif perempuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Ketiga, pada Februari 2024, Hasyim diberi sanksi serupa karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum lantaran menunda revisi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 ketika pendaftaran capres-cawapres sudah berlangsung.

melibatkan kliennya.

"Ada perkara yang serupa, tetapi mungkin sedikit berbeda terkait dengan yang dialami oleh Wanita Emas. Ini yang sudah juga dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Jadi, setelah ada putusan dari DKPP, seharusnya memang target kami adalah sanksi yang diberikan tidak lagi peringatan lagi, tetapi adalah pemberhentian," tegasnya.

Adapun Hasyim Asy'ari membantah seluruh dalil aduan yang dilayangkan, karena menurut dia tak sesuai fakta yang ada. Ketua KPU itu juga menuturkan bahwa dirinya dirugikan karena aduan asusila atas dirinya menjadi konsumsi publik. (wid,rls,tmp/dya)

Meski Bermasalah saat Pemilu, KPU Pastikan Gunakan Sirekap di Pilkada 2024

JADWAL LENGKAP PILKADA 2024

 **27 Februari - 16 November 2024:** Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

 **24 April - 31 Mei 2024:** Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

 **5 Mei - 19 Agustus 2024:** pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan

 **24-26 Agustus 2024:** pengumuman pendaftaran pasangan calon

 **27-29 Agustus 2024:** pendaftaran pasangan calon

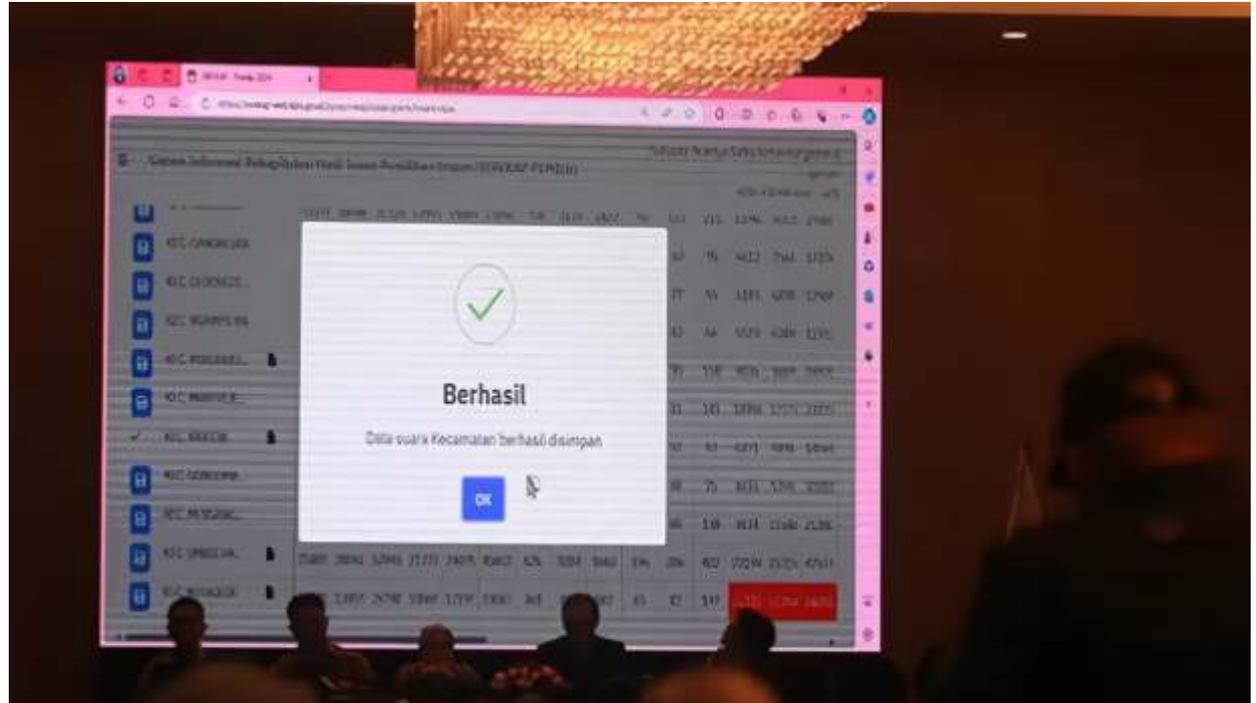
 **27 Agustus - 21 September 2024:** penelitian persyaratan calon

 **22 September 2024:** penetapan pasangan calon

 **25 September - 23 November 2024:** pelaksanaan kampanye

 **27 November 2024:** pelaksanaan pemungutan suara

 **27 November - 16 Desember 2024:** penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan.



(Ilustrasi) Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Suara KPU Kota Jogja yang diselenggarakan di Hotel Tara, Kota Jogja, Februari lalu. (Dok)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 serentak. Diketahui, alat bantu hitung itu bermasalah dan banjir kritikan pada Pemilu 2024.

"Sirekap akan kita gunakan untuk Pilkada, tentu dengan perbaikan-perbaikan. Jadi kita belajar di Pemilu 2024 untuk kita perbaiki di Pilkada 2024," ungkap Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos dalam diskusi daring pada kanal YouTube Perludem, Rabu (29/5/2024).

Betty mengakui adanya sejumlah tantangan pada Pemilu 2024 dalam menggunakan Aplikasi Sirekap. Oleh karena itu KPU juga dipastikan akan mencari kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Hal ini terutama dalam menampilkan data yang mengubah numerik menjadi bagan yang ditampilkan.

"Jadi bapak ibu pun menemukan data c hasil pun itu dari Sirekap dan ini akan kami perbaiki terutama ketika menampilkan data dari numerik menjadi data yang table. Ini akan kami perbaiki," sambungnya.

Betty mengatakan aplikasi Sirekap sangat membantu bukan hanya dari sisi penyelenggara untuk menghimpun data dari form C Hasil yang difoto oleh petugas KPPS. Namun peserta pemilu pun dapat mengakses hasil C Hasil yang telah difoto oleh petugas.

Nantinya petugas KPPS yang bisa mengunggah foto C hasil merupakan petugas yang telah terakreditasi. Artinya, hanya nomor-nomor yang

telah terdaftar yang bisa mengirimkan foto form C Hasil.

"Jadi enggak sembarangan nomor handphone bisa mengirimkan gambar (C Hasil)," tutupnya.

Verifikasi Calon Perorangan Diperpanjang

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari memerintahkan jajarannya di daerah untuk memperpanjang durasi tahapan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah perseorangan atau independen Pilkada 2024. Arahannya itu disampaikan lewat Surat Dinas beromor 815/PL.02.7-SD/2024.

Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan yang dilakukan KPU provinsi dan kabupaten/kota terhitung dimulai sejak Senin (13/5/2024) sampai Minggu (2/6/2024) mendatang. Dalam jadwal yang diterbitkan KPU sebelumnya, proses tersebut semestinya berakhir hari ini, Rabu (29/5/2024).

Dengan demikian, tahapan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi juga disesuaikan dengan jadwal baru menjadi Minggu (2/6/2024) dari yang sebelumnya hari ini. Dalam surat dinas tersebut, Hasyim menyinggung pedoman teknis mengenai proses verifikasi bapaslon perseorangan masih difinalisasi. Sehingga, pihaknya melakukan penyesuaian jadwal.

"Sambil menunggu pengundangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada Serentak 2024," imbuhnya.

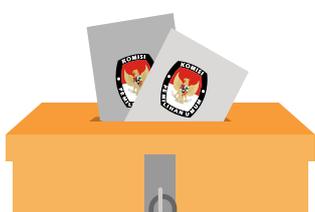
Lebih lanjut, KPU RI menetapkan jadwal perbaikan dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan menjadi Senin (3/6/2024) sampai Jumat (7/6/2024). Sedangkan verifikasi administrasi perbaikannya dilakukan pada Sabtu (8/6/2024) sampai Selasa (18/6/2024).

Terpisah, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menanggapi ihwal sepinya bapaslon yang mencoba mendaftar lewat jalur perseorangan. Menurutnya, KPU tidak dapat begitu saja mengubah syarat penyerahan dukungan bagi bapaslon perseorangan. Sebab, ketentuan tersebut diatur lewat Undang-Undang tentang Pilkada.

"Kalau (syarat dukungan) itu kami tidak bisa mengubah selama undang-undangnya tidak diubah. Jadi itu tetap menjadi dasar KPU dalam melakukan batasan-batasan terhadap semua bakal calon ketika ingin maju dari jalur perseorangan," katanya.

Diketahui, hanya ada dua bapaslon gubernur-wakil gubernur yang syarat dukungannya diterima oleh KPU provinsi dan saat ini masih dalam proses verifikasi administrasi. Kedua bapaslon tersebut adalah H Muda Mahendara-Suyanto Tanjung (Kalimantan Barat) dan Dharma Pongrekun-R Kun Wardana Abyoto.

Sementara itu, KPU kabupaten menerima syarat dukungan dari 80 bapaslon bupati-wakil bupati. Adapun KPU kota menerima 21 bapaslon wali kota-wakil wali kota. (wid,ant,ist/dya)



Jelang Idul Adha, Bupati Blitar Lepas 273 Petugas Pemantau Kesehatan dan Pemotongan Hewan Qurban

BLITAR - Menjelang Idul Adha 1445 H/2024 di Kabupaten Blitar, Bupati Blitar, Rini Syarifah melepas 273 petugas pemantau kesehatan dan pemotongan hewan qurban di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Rabu (29/5/2024).

Disampaikan Bupati Blitar, Rini Syarifah dalam sambutannya bahwa sebelum Idul Adha yang jatuh pada 17 Juni 2024, Pemkab Blitar melalui Disnakan memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada petugas pemantau kesehatan dan pemotongan hewan qurban.

"Apa yang diterima dari Bimtek ini bisa bermanfaat, untuk mendapatkan qurban yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)," ujar Bupati Rini.

Lebih lanjut diungkapkan orang nomor satu di Kabupaten Blitar tersebut sekedar mengingatkan bahwa pada 2022 lalu, banyak hewan ternak mengalami penyakit mulut dan kuku (PMK) yang luar biasa seperti bencana.

"Termasuk penyakit Lumpy Skin Disease (LSD), terus dilakukan upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit ternak tersebut. Hingga bisa dikendalikan dan Kabupaten Blitar berhasil, menyelesaikan masalah PMK dan LSD," ungkapnya.

Ditandaskan Bupati Blitar perempuan pertama tersebut, jika adanya petugas pemantau kesehatan dan pemotongan hewan qurban juga bisa mencegah penyakit diluar RPH.

Sehingga memanfaatkan dengan baik Bimtek ini, sebagai bekal petugas yang terjun ke masyarakat. Agar bisa memberikan rasa aman, bahwa hewan yang akan diqurbankan aman sehat, layak dan halal dikonsumsi

"Jika ada kendala di lapangan, diselesaikan dengan cara yang



Bupati Blitar, Rini Syarifah menyerahkan peralatan pada perwakilan petugas pemantau kesehatan dan pemotongan hewan qurban.

profesional, efektif, tepat, terukur dan proposional dan tentunya humanis," tandasnya.

Terakhir Bupati Rini berharap agar berjalan khidmat, serta daging qurban yang dibagikan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) pungkasnya.

Tampak hadir pada kegiatan ini, Sekda Kabupaten Blitar, Asisten, Kadisnakan, Kadis Pertanian, Balai Besar Peternakan Batu, PCNU, PD Muhammadiyah, Dewan Masjid, Ketua Forum Ponpes Kabupaten Blitar, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jatim 8, Paravetindo Cabang Blitar Raya.

Selanjutnya Bupati Rini secara simbolis menyerahkan peralatan, pada perwakilan petugas pemantau kesehatan dan pemotongan hewan

qurban. Sekaligus melepas 273 orang petugas dan membuka Bimtek yang digelar Disnakan Kabupaten Blitar, dengan pemateri dari Balai Besar Peternakan Batu, DR.drh Iskandar Muda dan Kemenag Kabupaten Blitar, Mun'im Sufufi.

Dalam kesempatan ini Bupati Rini juga sempat berdialog dengan Pemdes Wates, Gandusari dan Wlingi yang mengikuti Bimtek melalui zoom.

Sebelumnya, dalam laporan yang disampaikan Kepala Disnakan Kabupaten Blitar, Eko Susanto dihadapan Bupati Blitar mengatakan dalam rangka persiapan menyambut Idul Adha 1445 H/2024 M dan dalam upaya penjaminan keamanan daging hasil pemotongan hewan qurban, diperlukan pengawasan lebih intensif

terutama tata cara penembeliahannya.

"Maka dibentuk tim pemantau kesehatan dan pemotongan hewan qurban di Kabupaten Blitar, jumlah petugas sebanyak 273 orang yang bertugas di setiap desa dan kelurahan, serta di RPH Wlingi, Srengat dan Kademangan," kata Eko.

Terdiri dari 97 petugas Disnakan, 81 orang dari sukarelawan masyarakat, 63 petugas dari Paravetindo Cabang Blitar Raya dan 32 dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Jatim 8.

Diterangkan Eko tugas tim memastikan hewan qurban sehat dan memenuhi syariat agama, serta mencegah penyakit zoonosis dan daging qurban yang dibagikan harus aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

"Selain menerjunkan tim pemantau kesehatan dan pemotongan hewan qurban, Disnakan juga melaksanakan sosialisasi pemotongan hewan qurban dengan jumlah peserta sekitar 1000 orang. Dari perwakilan takmir masjid, ponpes, perangkat desa/kelurahan melalui zoom," terangnya.

Bimtek ini menurut Eko bisa memberikan informasi dan edukasi kepada petugas pemantau kesehatan dan pemotongan hewan, takmir masjid dan ponpes. "Termasuk bagi panitia pemotongan hewan qurban, yang dilaksanakan diluar RPH.

Agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan pengendalian penyakit menular hewan," katanya. Ditambahkan Eko dari evaluasi Idul Adha tahun 2023, jumlah sapi yang dopotong 1.964 jantan 157 betina

14.008 kambing dan domba 45 ekor. Dengan total transaksi hewan ternak pada bulan Idul Adha mencapai sekitar Rp 101 miliar imbuhnya. (Arief Sukaputra/*)

Koordinator Jamaah Ilegal Terancam Penjara, Sanksi Berlaku Mulai 2 Juni

MAKKAH - Petugas Saudi makin gencar menggelar razia di pintu masuk Makkah bagi pengunjung yang tidak memiliki izin. Sanksi pun bakal diterapkan mulai 2 Juni nanti.

Langkah ini sesuai janji pemerintah Arab Saudi yang memperketat pengawasan di musim haji 2024. Langkah ini akan dilakukan terus menerus hingga 20 Juni.

"Penegakan ini mencakup individu yang kedatangan tanpa izin haji di Makkah, wilayah pusat, tempat-tempat suci, stasiun kereta Haramain di Rusafyah, pusat kendali keamanan, pusat penyortiran, dan pusat kendali keamanan sementara. Hukuman ini

berlaku mulai 02/06/2024 hingga 20/06/2024," lapor kantor berita Saudi, SPA, dikutip Rabu (29/5/2024).

Kementerian menegaskan, bagi pengunjung Makkah yang tidak mengantongi izin termasuk izin akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10.000 Riyal atau sekitar Rp 42,8 juta (kurs Rp 4.288). Selain itu, pelanggar akan dideportasi ke negara asal mereka dan dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun.

Bagi koordinator jamaah haji ilegal atay memasuki wilayah Makkah tanpa izin juga dikenakan sanksi khusus. Mereka akan mendapat hukuman berupa ancaman penjara hingga 6

bulan dan denda hingga 50.000 Riyal atau sekitar Rp 214,4 juta. Sanksi juga diberlakukan bagi pelanggar berulang akan dikenakan denda dua kali lipat.

Otoritas juga akan menyita sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji ilegal sesuai dengan putusan pengadilan dan pengangkut ekspatriat akan dideportasi. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat ini dilarang masuk Kerajaan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum.

Sebelumnya, beredar di media sosial video razia visa haji yang dilakukan petugas Arab Saudi. Sejumlah rombongan jamaah diduga asal Indonesia disebut terjaring dalam

razia tersebut. Rombongan bus yang berada di wilayah Ji'ranah turut terjaring dalam aksi razia oleh petugas.

Video tersebut diunggah oleh Instagram agen travel haji dan umrah Dwins Travel (@dwinstravel) pada Minggu, 26 Mei 2024. Dinarasikan petugas keamanan di Makkah juga menyisir para pengunjung hotel.

"Ada razia di hotel-hotel di Makkah bagi jemaah haji ilegal yang tidak memiliki visa haji, seperti visa ziarah. Bagi teman-teman harap diperhatikan kalau mau beribadah, beribadah yang benar dan sesuai aturan," demikian keterangan perekam video. (wid,spa,ist/dya)

Syarat Pembangunan Gedung bagi UMKM Dirombak, Bakal Lebih Efisien

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana merombak persyaratan dalam proses perizinan bangunan gedung (PBG) di Kota Malang. Khususnya bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DUPUR-PPK) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi.

Dandung menjelaskan, UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis yang kompleks untuk perizinan bangunan gedung. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya akan menerapkan beberapa perubahan dalam proses perizinan.

"Artinya, misal untuk bangunan yang sudah ada SLF, katakanlah rekomendasinya harus memperbaiki satu hal, kan itu gak bisa dilaksanakan dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 minggu. Nah ini kalau kita biarkan dulu, belum tentu sampai satu setengah tahun pun sudah diperbaiki," ujar Dandung, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (29/5/2024).

Pertama, pemilik UMKM yang mengajukan permohonan perizinan,

sambung Dandung, akan diberikan solusi khusus yang lebih efisien.

Pelaku UMKM akan diminta untuk membuat surat pernyataan yang menetapkan batas waktu maksimal 4-6 bulan, untuk melaksanakan perbaikan yang diperlukan dalam bangunan mereka. Jika dalam rentang waktu tersebut perbaikan tidak dilakukan, izin mereka akan ditanggihkan.

"Akan ada solusi untuk masyarakat khususnya pemohon yang merupakan pelaku UMKM. Tapi kalau untuk pengusaha besar, ya gak ada toleransi harusnya," tambah Dandung.

Selain itu, Dinas PUPR-PPK Kota Malang juga akan memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemilik UMKM dalam mengurus perizinan. Langkah ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk memahami dan memenuhi persyaratan perizinan dengan lebih baik.

Lebih lanjut Dandung menegaskan, meskipun ada upaya untuk mempercepat proses perizinan bagi UMKM, hal ini tidak berarti menghilangkan persyaratan yang ada. Menurutnya, persyaratan tetap akan dipertahankan, namun akan dikaji



Kepala Dinas PUPR-PPK Kota Malang, Dandung Djulharjanto. (Santi/Lenteratoday)

secara cermat untuk melihat mana yang dapat ditoleransi demi efisiensi dalam memberikan izin.

"Makanya kami sekarang mau melakukan percepatan. Tapi bukan berarti kami menghilangkan persyaratan. Persyaratan ini kan ada persyaratan yang sifatnya mayor dan minor. Mana saja yang masih bisa ditoleransi," bebernya.

Sebelumnya, Dandung

menyampaikan, peningkatan kompleksitas persyaratan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah menimbulkan tantangan bagi pemohon. Jika dulu, satu gambar menurutnya telah cukup untuk mengajukan permohonan, tetapi kini persyaratan harus membutuhkan gambar struktur, arsitektur, elektrikal, dan saluran yang memenuhi standar teknis yang ketat. (Santi/Dya)

Pedagang Pasar Induk Batu Soroti Verifikasi Pedagang hingga Payung Hukum

BATU - Ketua Koordinator Zonasi Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Didin Dariantio, menyampaikan sejumlah isu penting yang perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Diantaranya penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pasar, peningkatan keamanan, serta regulasi untuk keberlangsungan pedagang pasar di masa depan.

"Kami sudah menyampaikan ke DPRD. Kami paguyuban meminta agar Diskoperindag segera menambah petugas keamanan. Banyak kelalaian yang terjadi akibat minimnya petugas," ujar Didin, Rabu (29/5/2024).

Menurut Didin, kekurangan petugas keamanan menyebabkan kesemrawutan yang terjadi di dalam pasar. "Banyak tempat sampah berpindah lokasi dan taman di pasar induk digunakan untuk penempatan lincak. Permasalahan ini perlu diatasi dengan menambah petugas agar dapat mengawasi dan memberi teguran," jelasnya.

Selain masalah keamanan, Didin juga menyoroti pentingnya verifikasi pedagang yang menempati kios.



Suasana pasar pagi di halaman Pasar Induk Among Tani Kota Batu. (Dok. Istimewa)

Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar diketahui mana saja pedagang yang aktif berjualan dan mana yang belum, meskipun telah mengantongi SK.

"Setelah verifikasi, kami minta untuk Pemkot segera mengeluarkan Surat Ijin Hak Pakai (SIHP). Karena kalau sesuai aturan, pedagang yang tidak aktif atau tutup selama tiga

bulan, kiosnya bisa ditarik oleh Diskoperindag," tambahnya.

Dalam kesempatannya ini, paguyuban pasar juga meminta agar Diskoperindag segera melakukan sosialisasi pengelolaan sampah yang saat ini dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskoperindag Kota Batu, Aries

Setiawan, menyatakan pihaknya akan menghimpun seluruh masukan dari pedagang dan menindaklanjutinya. "Kami sudah himpun semua masukan dari hearing kemarin. Ini akan dibahas agar pengelolaan Pasar Induk Among Tani maksimal," ujarnya saat dikonfirmasi.

Aries menambahkan, pengelolaan sampah yang saat ini dilakukan oleh KSM, tidak akan dipungut retribusi oleh dinas terkait. "Kami juga akan segera melakukan pendataan untuk mengetahui pedagang yang tidak aktif dan mengambil tindakan sesuai aturan, serta menambah petugas keamanan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasar," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengungkapkan keprihatinannya bahwa meskipun Pasar Induk Among Tani telah terbangun megah, payung hukum yang sah masih belum ada. "Pedagang sudah menempati pasar sejak 2 Oktober lalu, tapi Perda belum ada. Ini karena dokumen naskah akademiknya belum lengkap," ujarnya. (Santi/Dya)

JAMPIDSUS FEBRIE ARDIANSYAH YANG DIDUGA DIKUNTIT ANGGOTA DENSUS 88

SUASANA pasar pagi di halaman Pasar Induk Among Tani Kota Batu. (Dok. Istimewa)

Febrie diketahui saat ini tengah memimpin penyelidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Kasus ini terbilang besar dan menjadi perhatian publik karena sudah ada 21 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Ditambah lagi, nilai kerusakan lingkungan dari kasus ini diperkirakan mencapai Rp 271 triliun.

Selain kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Jampidsus juga diketahui menangani satu kasus yang juga menjadi perhatian publik, yakni korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tidak hanya menteri aktif yang saat itu ditetapkan sebagai tersangka, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johhy G Plate, kasus ini juga menyeret Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi.

Dalam kasus ini, Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Serta, membayar uang pengganti sebesar Rp 15,5 miliar.

Dalam perkara ini, Johnny, Anang Achmad Latif, dan Yohan Suryanto dinilai terbukti melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang merugikan negara Rp 8,032 triliun.

Sementara itu, Achsanul Qosasi dituntut lima tahun penjara karena telah menerima uang sebesar 2,6 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 40 miliar untuk mengkondisikan temuan BPK dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G yang dikelola oleh Bakti Kemenkominfo.

Siapa sosok Febrie Ardiansyah?

Febrie dilantik menjadi Jampidsus pada 6 Januari 2022. Dia dipromosikan menduduki jabatan itu setelah selama

lima bulan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta.

Dikutip dari laman resmi Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan, Febrie mengawali kariernya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri (Kajari) Sungai Penuh, Kerinci pada tahun 1996.

Dia menduduki jabatan terakhir sebagai Kasie Intelijen di Kejari Sungai Penuh sebelum berpindah-pindah tugas.

Kariernya sebagai jaksa juga cukup moncer. Terbukti, Febrie pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Aspidsus Kejati Jawa Timur, Wakajati Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, dan Kajati Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hingga akhirnya, Febrie menjabat sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan. Lalu, menjadi Kajati DKI.

Saat menjabat sebagai Dirdik pada Jampidsus sejumlah kasus besar juga ditangani Febrie. Tiga di antaranya adalah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, kasus korupsi PT Asabri, dan korupsi fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara (BTN).

Dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (AJS) negara mengalami kerugian sebesar Rp 16,8 triliun. Kasus ini terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan sebesar Rp 12,4 triliun (Kompas)





TANDA-TANDA PENYAKIT JANTUNG PADA KULIT

PERUBAHAN kulit bisa menunjukkan kondisi kesehatan, salah satunya penyakit jantung yang berpotensi di muncul tubuh manusia.

Jantung berfungsi sebagai penyedia dan penyalur oksigen darah ke seluruh tubuh, apabila kinerja organ ini terganggu bisa memicu risiko penyakit seperti stroke, aneurisma, dan serangan jantung.

Dilansir dari mediacover-hospitals.in dan brgeneral.org, orang dengan gaya hidup tidak sehat seperti jarang olahraga, mengonsumsi alkohol, merokok, dan tidak menjaga asupan makanan memiliki risiko lebih besar mengidap penyakit jantung.

Namun, sayangnya orang seringkali mengabaikan kesehatan jantung karena tidak mengetahui tanda-tanda yang diberikan tubuh apabila organ ini mengalami masalah. Akibatnya, penyakit ini menyumbang persentase kematian paling tinggi di Indonesia.

Karena itu, Anda wajib mengetahui setiap tanda perubahan kulit yang menunjukkan kondisi kesehatan jantung, agar dapat menekan angka kematian akibat komplikasi penyakit ini. Tanda Peringatan Penyakit Jantung Pada Kulit

1. Kulit biru atau ungu (sianosis)

Sianosis merupakan kondisi dimana kulit, bibir, atau kuku menunjukkan perubahan warna menjadi biru atau ungu, akibat menurunnya kinerja jantung dalam menyuplai darah ke seluruh organ. Akibatnya, tubuh mengalami kekurangan oksigen sehingga memicu komplikasi penyakit seperti serangan jantung dan stroke.

Dengan melihat risiko penyakit yang cukup serius akibat terjadinya sianosis. Untuk itu, Anda wajib berkonsultasi kepada dokter apabila mengalami perubahan warna pada tubuh, khususnya kulit.

2. Kulit kekuningan (xanthelasma)

Xanthelasma merupakan perubahan warna kulit kekuningan yang terjadi di area mata atau kelopak mata, akibat tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Kondisi ini bisa memicu komplikasi penyakit

jantung seperti stroke dan serangan jantung.

Jika Anda mengalami xanthelasma, wajib untuk memeriksakan kadar kolesterol secara rutin dan menerapkan perubahan gaya hidup sehat, agar bisa menurunkan risiko terkena penyakit jantung di usia muda.

3. Bengkak di telapak kaki dan tungkai bawah (edema)

Edema terjadi dengan munculnya pembengkakan pada tungkai dan pergelangan kaki, akibat menurunnya kinerja jantung dalam memompa darah. Kondisi ini menyebabkan risiko komplikasi cukup serius seperti gagal jantung.

Gagal jantung menyebabkan penumpukan cairan ekstra di kaki, pergelangan kaki, paha, atau perut. Akibatnya, seseorang bisa mengalami sesak napas, kelelahan, nyeri dada, nafsu makan menurun, dan menurunnya konsentrasi.

4. Bintik atau garis merah (petechiae and splinter hemorrhages)

Petechiae terjadi ketika timbulnya bintik-bintik kecil berwarna merah atau ungu pada kulit dan garis coklat kemerahan di bawah kuku. Perubahan ini dikaitkan dengan masalah jantung tertentu seperti endokarditis, yaitu infeksi akibat bakteri yang menempel pada katup jantung.

5. Ruam kulit (livedo reticularis)

Livedo reticularis terjadi ketika munculnya ruam berenda seperti jaring pada area kulit, akibat terganggunya suplai pembuluh darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, stroke, aritmia, dan gagal jantung.

6. Kulit dingin dan berwarna pucat

Penyakit jantung seperti PAD terjadi karena adanya penyempitan arteri yang menghambat aliran darah ke seluruh tubuh. Biasanya,

pengidap PAD menunjukkan tanda seperti kulit dingin yang disertai warna pucat pada area tungkai kaki dan tangan.

7. Kulit bertekstur serupa lilin

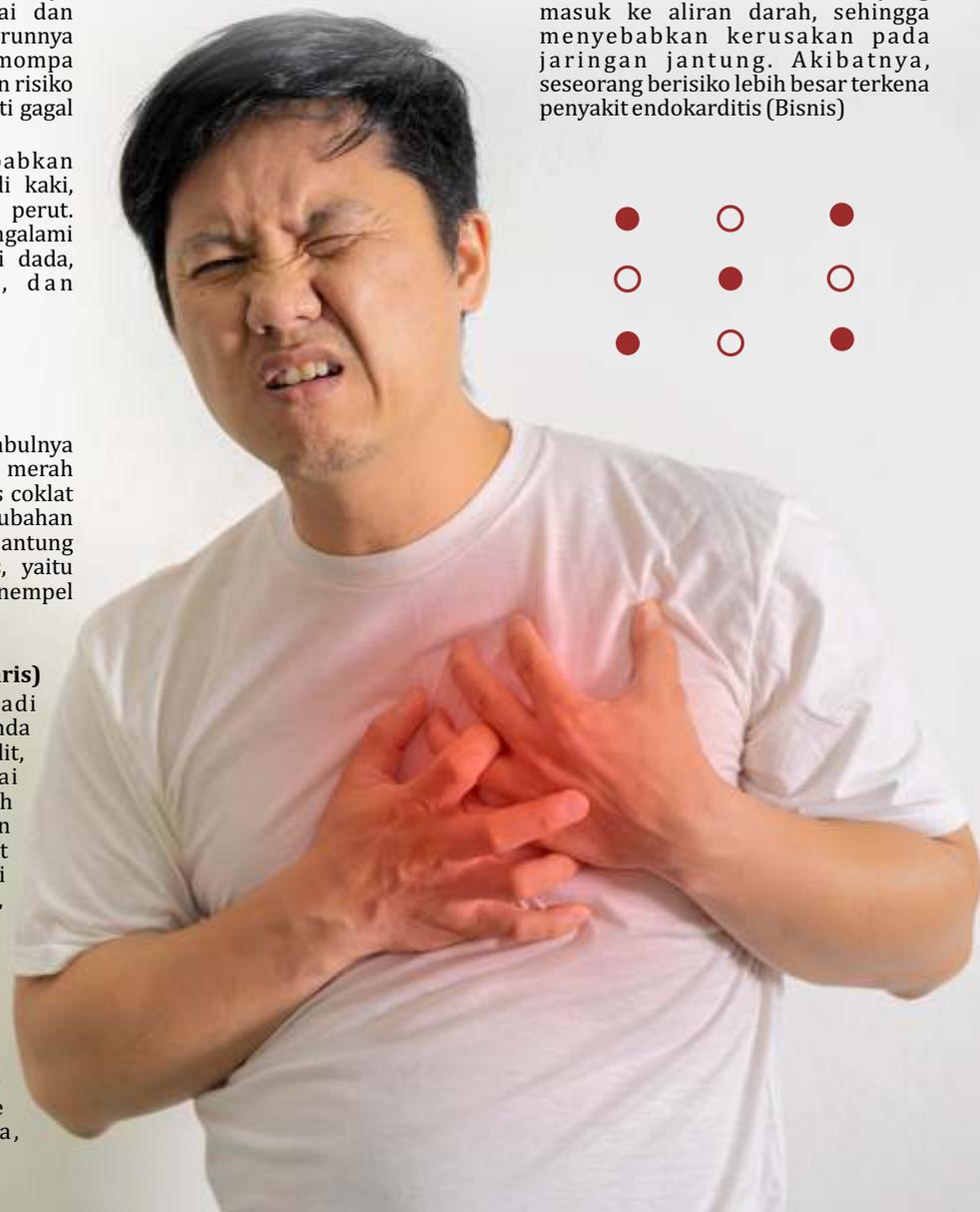
Kulit bertekstur serupa lilin berwarna oranye menunjukkan adanya masalah pada kesehatan jantung seperti kardiovaskular, yaitu penyempitan atau penyumbatan

pembuluh darah.

Selain itu, kulit bertekstur ini juga menjadi tanda penyakit lain seperti kolesterol, diabetes, dan hipertensi.

8. Benjolan pada kulit

Benjolan kulit yang disertai nyeri pada area tangan, kaki, atau telapak tangan adalah tanda peringatan menurunnya kinerja organ jantung. Kondisi ini terjadi, karena adanya infeksi bakteri atau kuman yang masuk ke aliran darah, sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan jantung. Akibatnya, seseorang berisiko lebih besar terkena penyakit endokarditis (Bisnis)



DAFTAR 10 NEGARA DENGAN PENGGUNA FACEBOOK TERBANYAK

FACEBOOK menjadi platform media sosial teratas yang memiliki pengguna aktif bulanan terbanyak per April 2024.

Pengguna aktif bulannya mampu mencapai 3,06 miliar orang. Dilansir dari Statista, Sabtu (25/5/2024), sederet negara terkemuka menempati posisi 10 besar menggunakan media sosial Facebook di dunia.

Data Statista menunjukkan bahwa Facebook menjadi media sosial yang paling banyak digunakan di India, yakni mencapai 378,05 juta pengguna.

Selain India, ada beberapa negara lain dengan lebih dari 100 juta pengguna Facebook masing-masing. Perinciannya, Amerika Serikat, Indonesia, dan Brasil dengan masing-masing memiliki 193,8 juta, 119,05 juta, dan 112,55 juta pengguna Facebook pada April 2024.

Kemudian, ada Meksiko yang memiliki 92,7 juta pengguna, Filipina

sebanyak 87,7 juta pengguna, dan Vietnam mengantongi 75,3 juta pengguna Facebook.

Berikutnya, Bangladesh memiliki 55,6 juta pengguna, Thailand sebanyak 50,05 juta, dan Pakistan sebanyak 47,35 juta pengguna.

"Dengan audiens sebesar ini, tidak mengherankan bahwa sebagian besar pendapatan Facebook dihasilkan melalui periklanan," tulis Statista.

Pada Juli 2021, ditemukan bahwa 98,5% pengguna aktif mengakses akun Facebook mereka dari perangkat seluler.

Bahkan, hampir 81,8% audiens Facebook di seluruh dunia mengakses platform hanya melalui telepon seluler.

Mengutip Wikipedia, Facebook adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan orang lain.

Platform ini menawarkan berbagai fitur menarik, seperti berbagi foto,

video, bahkan marketplace. Namun, perlu diketahui bahwa pencurian data pribadi menjadi salah satu risiko yang harus diwaspadai saat menggunakan Facebook.

Dibuat pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg bersama rekan-rekan mahasiswa dan teman sekamarnya di Harvard College, yaitu Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovits, dan Chris Hughes, namanya berasal dari direktori facebook yang sering diberikan kepada mahasiswa universitas Amerika.

Anggota awalnya terbatas hanya untuk mahasiswa Harvard, secara bertahap berkembang ke universitas-universitas lain di Amerika Utara, dan sejak tahun 2006, untuk siapa saja yang berusia di atas 13 tahun.

Hingga Desember 2022, Facebook mengklaim 3 juta pengguna aktif perbulan, dan menduduki peringkat ketiga di seluruh dunia di antara situs

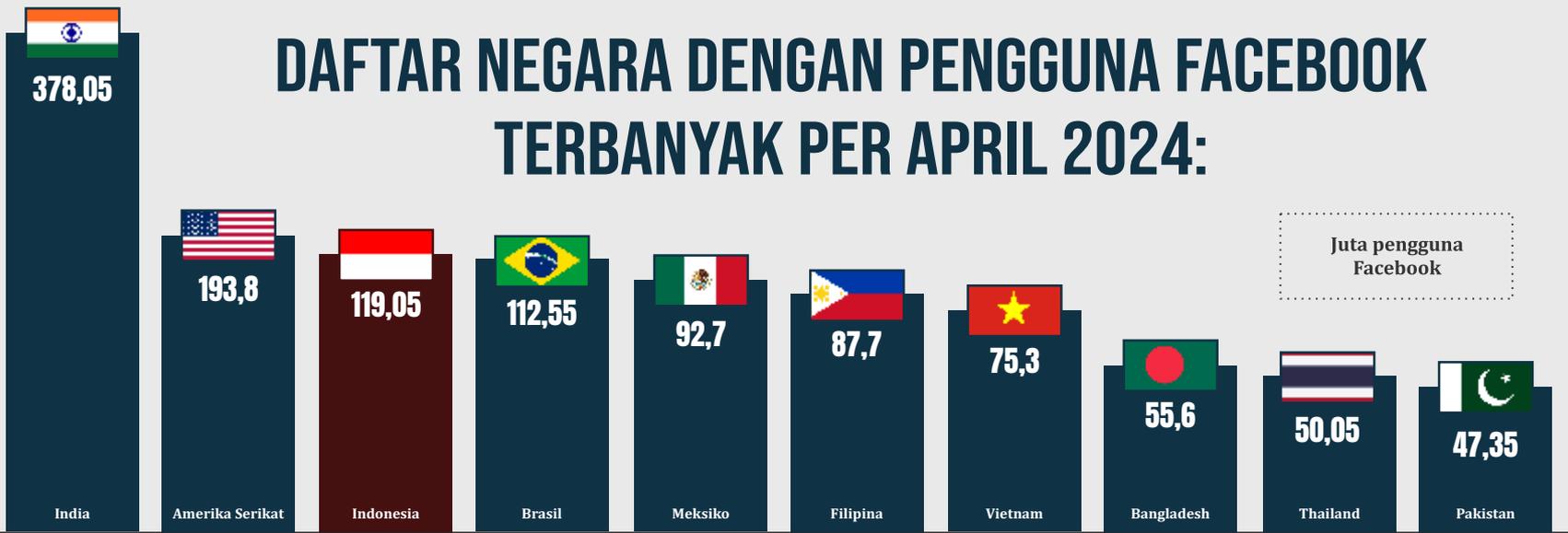
web yang paling banyak dikunjungi. Ini adalah aplikasi seluler yang paling banyak diunduh selama dekade 2010-an.

Facebook dapat diakses dari perangkat yang memiliki konektivitas internet, seperti komputer pribadi dan smartphone.

Setelah mendaftar, pengguna dapat membuat profil yang menampilkan informasi tentang diri mereka.

Mereka dapat mengirimkan teks, foto, dan multimedia yang dibagikan dengan pengguna lain yang telah menyetujui menjadi "teman" mereka atau, dengan pengaturan privasi yang berbeda, secara publik.

Pengguna juga dapat berkomunikasi langsung satu sama lain dengan messenger, bergabung dengan kelompok berkepentingan umum, dan menerima pemberitahuan tentang aktivitas teman Facebook mereka dan halaman yang mereka ikuti (Bisnis)



8 GAYA HIDUP

UNTUK TURUNKAN

KOLESTEROL



AHLI Diet Manpreet Kalra membagikan beberapa tips efektif yang dapat membantu menurunkan kolesterol dengan membuat perubahan sehat dalam pola makan Anda.

Kadar kolesterol dapat meningkat terutama karena konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans, kelainan genetik, dan faktor gaya hidup seperti merokok, gaya hidup kurang gerak, dan alkohol.

Berikut tips menurunkan kadar kolesterol yang ditulis laman Hindustan Times.

1. Mulailah hari Anda dengan asam lemak omega-3 seperti air biji chia, kenari, dan lain-lain. Mengandung asam lemak esensial yang mengurangi peradangan dan meningkatkan profil lipid.

2. Nikmati sarapan tinggi serat dan kaya protein seperti oat dan besan cheela dengan parutan ghia. Ini meningkatkan kadar LDL atau kolesterol jahat.

3. Usahakan berjalan kaki 10-15 menit setelah makan. Ini menyeimbangkan kadar gula darah dan meningkatkan profil lipid.

4. Menambahkan jahe dan bawang putih ke dalam kari dan dal (sup dari kacang-kacangan kering) juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Mereka juga membantu mencegah aterosklerosis, atau penumpukan plak di arteri.

5. Hindari jajanan olahan seperti keripik dan namkeen. Makanan ini mengandung minyak nabati olahan yang meningkatkan kolesterol.

6. Batasi konsumsi makanan yang terbuat dari roti seperti kue dan kerupuk. Makanan ini tinggi gula dan mengandung lemak jenuh.

7. Tambahkan sayuran kaya vitamin B seperti sayuran berdaun hijau, brokoli, dan kacang hijau. Mereka menurunkan kadar kolesterol dan melindungi jantung.

8. Tambahkan suntikan penurun kolesterol di pagi hari. Selain menurunkan kolesterol, juga menurunkan peradangan.

Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh, dan juga berasal dari makanan hewani. Senyawa ini membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak.

Dalam kadar yang sesuai, kandungan tersebut sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru. Gunanya agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal.

Selain itu, senyawa ini juga tubuh butuhkan untuk proses pencernaan, produksi hormon, dan membentuk vitamin D. Namun, jika kadarnya terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan

menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi.

Di dalam darah, senyawa ini dibawa oleh protein. Gabungan keduanya disebut dengan lipoprotein. Dua jenis utama lipoprotein adalah lipoprotein dengan kepadatan rendah (LDL) atau kolesterol jahat dan lipoprotein dengan kepadatan tinggi (HDL) atau kolesterol baik.

Tugas LDL adalah mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. Namun jika jumlahnya melebihi kebutuhan, maka dapat mengendap pada dinding-dinding arteri yang menyebabkan penyakit.

Sementara itu, HDL bertugas untuk mengangkut kolesterol kembali ke dalam organ hati, sebagai kebalikan dari LDL. Dalam hati, senyawa ini akan dihancurkan atau dikeluarkan oleh tubuh melalui feses atau kotoran.

Kadar kolesterol dalam darah bervariasi. Tergantung apakah memiliki risiko tinggi atau rendah untuk terkena penyakit pembuluh arteri.

Lantas, apa keluhan kolesterol tinggi?

Mengutip halodoc, rasa sakit di dada bagian depan atau pada lengan (angina) ketika seseorang mengalami stres atau

sedang melakukan kegiatan fisik yang berat juga dapat terjadi akibat kadar kolesterol yang tinggi.

Hiperkolesterolemia juga meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit jantung koroner.

Jika tidak mengubah pola makan dan tidak berhenti merokok, pengidap kondisi ini akan lebih berisiko terkena stroke atau penyakit jantung. Pada rokok ditemukan sebuah zat kimia yang disebut akrolein.

Zat ini dapat menghentikan aktivitas kolesterol baik atau HDL untuk mengangkut timbunan lemak menuju hati. Akibatnya, bisa terjadi penyempitan arteri atau aterosklerosis (Antara)



Menanti Babak Akhir ... (dari Hal 1)

JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan penyidikan kasus korupsi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2020 sudah masuk babak akhir. Dia mengatakan dalam waktu satu minggu kasus ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

"Perkara timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan, saya mengharapkan dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu, (29/5/2024).

Dia melanjutkan pada tahap akhir penanganan kasus ini, Kejaksaan Agung telah mendapatkan hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari hasil penghitungan itu, kerugian negara kasus timah melonjak dari Rp 271 triliun menjadi Rp 300 triliun.

"Lumayan fantastis, yang semula kita perkirakan Rp 271 triliun dan ini mencapai Rp 300 triliun," katanya.

Selain penambahan kerugian negara, Kejagung menyatakan juga menetapkan satu tersangka baru. Tersangka itu adalah mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Aryono.

Bambang diduga mengubah rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2019. Dia diduga menambah jumlah RKAB dari 30.217 metrik ton menjadi 68.300 metrik ton.

Penambahan ini diduga dilakukan untuk memfasilitasi aktivitas transaksi timah yang diproduksi secara ilegal. "Penambahan ini dilakukan tanpa kajian apapun," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi.

Dengan penetapan tersangka baru ini, Kejagung sudah menetapkan total 22 tersangka. Sementara saksi yang diperiksa mencapai jumlah 200 orang, termasuk artis Sandra Dewi yang suaminya menjadi tersangka.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini diserahkan oleh Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Ateh menyebut, pihaknya melakukan penyidikan kerugian negara usai diminta oleh Kejaksaan Agung.

Berdasarkan permohonan tersebut BPKP melakukan prosedur audit, penyidikan dan juga meminta keterangan para ahli. "Kami serahkan hasil audit perhitungan kerugian negara perkara dugaan tidak pidana korupsi tata niaga komoditas timah, seperti disampaikan Jaksa Agung total kerugian sekitar Rp 300 triliun," kata Ateh.

Penanganan perkara timah masih terus bergulir. Selain memeriksa saksi, penyidik juga melakukan penyitaan aset para tersangka untuk mengembalikan kerugian negara.



Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020 Bambang Gatot Ariyono (BGA) ditahan. (Dok istimewa)

Hingga saat ini penyidik telah melakukan pemblokiran 66 rekening, 187 bidang tanah atau bangunan, serta menyita uang tunai, 55 unit alat berat dan 16 mobil dari para tersangka.

Selain itu, tim penyidik juga menyita aset berupa 6 smelter di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan total luas bidang tanah 238.848 m², serta satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Enam smelter akan ditindaklanjuti dengan pengelolaan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan tetap menjaga nilai ekonomis dan tidak memberikan dampak sosial.

Fakta Penguntitan

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyebut kasus penguntitan terhadap dirinya oleh anggota Polri telah diambil alih oleh Jaksa Agung, sehingga menjadi urusan kelembagaan.

"Jadi, kalau mengenai istilahnya kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung, karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan," kata Febrie di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Ia mengatakan saat ini dirinya fokus menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah di PT Timah dari 2015 hingga 2022 agar bisa dilimpahkan ke pengadilan.

Kejagung juga buka suara terkait sosok jenderal purnawirawan Polri berinisial B yang disebut-sebut berperan dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah periode 2015-2022.

Jampidsus Febrie Adriansyah mengaku tahu soal isu yang sedang beredar tersebut. Namun ia enggan berspekulasi. Febrie menyatakan, pihaknya tetap mengacu pada alat bukti siapa yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Ini saya lihat banyak di medsos beredar si a si b ini terlibat tetapi ukuran kita tentunya alat bukti yang kita peroleh ini apa? Kita juga dibantu oleh PPATK, TPPU kita pelajari betul

siapa yang terima dari hasil kejahatan itu semua betul-betul dengan cermat kita lakukan," ujar Febrie.

Febrie mengatakan, jika ada bukti soal keterlibatan jenderal purnawirawan dalam kasus tersebut dalam fakta persidangan, maka jaksa penuntut umum (JPU) akan membuat usulan surat untuk penetapan tersangka.

"Kalau ini sudah digelar di pengadilan, temen-temen bisa liat dari alat bukti yang dibuka, dari saksi yang bicara. Apabila ada keterlibatan, ada alat bukti disitu itu penuntut umum kami membuat nota pendapat untuk usulan sebagai tersangka dari hasil persidangan," kata dia.

Febrie tidak mau berpolemik. Ia menegaskan, saat ini sudah ada puluhan orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi timah yang akan segera menjalani sidang.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membenarkan adanya penguntitan oleh personel Polri kepada Jampidsus Febrie Adriansyah.

"Bahwa memang benar ada, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan," kata Ketut.

Penguntitan tersebut, kata dia, dilakukan oleh anggota Polri dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada hari Minggu, 19 Mei 2024. Setelah diketahui menguntit dan mengambil foto Jampidsus, anggota tersebut dibawa ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa, dan diketahui identitas-nya.

"Ternyata di dalam handphone yang bersangkutan ditemukan profiling Pak Jampidsus," kata Ketut.

Begitu pula dengan kejadian rangkaian kendaraan Brimob Polri yang berkeliling di Kejaksaan Agung juga merupakan rangkaian dari kejadian pengamanan anggota Densus yang menguntit Jampidsus.

Menurut Ketut, pada hari terungkapnya kegiatan penguntitan tersebut, setelah diperiksa, anggota Densus yang menguntit sudah diserahkan ke Paminal Mabes Polri.

"Pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri kami serahkan ke Polri untuk ditangani lebih lanjut," ujar Ketut.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu melalui akun media sosial (medsos)-nya @msaid_didu mencuitkan begini. "Publik paham siapa inisial 'B'

PROFIL BAMBANG GATOT, EKS DIRJEN MINERBA TERSANGKA BARU KORUPSI TIMAH

- Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah, 9 April 1960
- **Jejak Karir:** Kasubdit Pengembangan Layanan Bisnis (2001-2006), Kasubdit Pengembangan Investasi, Kerja sama Mineral dan Panas Bumi (2006-2008), Kepala Bisnis Mineral dan Batubara (2008-2013), Staf Ahli Kementerian ESDM bidang Ekonomi dan Keuangan (2014-2015), Dirjen Minerba (2015).
- **Pendidikan:** Fakultas Teknik Geologi dari Universitas Pembangunan Nasional-Veteran Yogyakarta (1987), Magister Manajemen dari IPWI Jakarta (1997), Doktor dari Ecola Nationela Mines De Paris (2002).
- **Kiprah di Minerba:** Selama menjadi Dirjen Minerba, Bambang berperan dalam proses perpanjangan bisnis tambang Freeport Indonesia (PTFI) dari sebelumnya Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport pun mendapatkan izin beroperasi pada 2018, saat dia di Dirjen Minerba dan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM. Pada 2018, Bambang Gatot juga pernah diperiksa KPK. Saat itu dia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

tersebut. Sudah lama yang bersangkutan 'atur' bisnis timah dan nikel."

Informasi Jenderal 'B' ini viral pasca dugaan penguntitan Jampidsus Febrie Adriansyah oleh 3 anggota Densus 88 saat sedang makan malam di sebuah restoran di Jakarta Selatan.

Ada gerak-gerik mencurigakan dari tiga orang tersebut yang menggunakan alat untuk merekam Febrie. Namun Polisi Militer (PM) yang mengawal Febrie berhasil menangkap salah satu anggota Densus 88.

Banyak spekulasi yang berkembang termasuk jenderal purnawirawan yang juga eks Kapolri ini, masih punya akses ke anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Disebut-sebut, jenderal 'B' ini dekat dengan Robert Bonosusatyo alias RBT alias RBS, pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT) yang masuk pusan korupsi PT Timah (Persero) Tbk. Dia diberikan posisi penting di PT RBT.

Dalam dugaan megakorupsi timah, penyidik Kejagung sempat memeriksa RBT alias RBS namun belum menetapkannya sebagai tersangka.

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, sempat mengirimkan surat somasi kepada Kejagung pada 28 Maret 2024. Lantaran, penyidik gedung bundar tak cepat menetapkan tersangka terhadap RBT.

Boyamin menduga RBT meminta crazy rich Helena Lim dan Harvey Moeis untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility (CSR). (wid,rls,tro,ist,ant/dya)

Nama Surya Paloh Muncul di Sidang SYL, Disebut Wakil Bendahara Nasdem

ALIRAN UANG KEMANTAN UNTUK BIAYAI KELUARGA SYL

- Renovasi rumah anak SYL
- Pembayaran dokter kecantikan anak SYL
- Istri SYL menerima setoran Rp 25-30 juta setiap bulan
- Rp 1.8 miliar untuk Umrah
- Pembelian kado emas untuk kondangan SYL Rp 7-8 juta
- Rp 16.6 miliar untuk acara keagamaan operasional menteri dan pengeluaran lain
- Tagian kartu kredit SYL Rp 215 juta dibayari Kementan
- Keperluan luar negeri Rp 6.9 Miliar
- Rp 840 juta mengalir ke Nasdem (dan sudah dikembalikan oleh NasDem ke KPK akhir maret 2024)
- Charter pesawat Rp 3 miliar
- Rp 300 juta untuk *Maintenance* apartemen pribadi SYL
- Pembelian onderdil kendaraan anak SYL
- Rp 1.6 miliar untuk kurban
- Pembayaran Alphard SYL Rp 340 juta
- Skincare anak dan cucu SYL
- Bon acara ulang tahun SYL dirembes ke kementan
- Permintaan US\$ 14 ribu dolar untuk kepentingan SYL



Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) tertawa bersama istrinya Ayun Sri Harahap (kanan) sebelum mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (29/5/2024). (Ist)

mengetahui sumber dana sembako dari Kementan, ia hanya mengetahui bahwa sumber dana itu berasal dari anak SYL, Indira Chuanda Thita Syahrul alias Thita. "Dari Bu Thita, awalnya," ujar dia.

Dalam sidang itu, penasihat hukum SYL, Djameludin Koedoeboen, mendalami keterangan Joice di persidangan.

"Siapa Ketua Partai NasDem yang Saudara ketahui saat ini?" tanyanya.

"Ketua Umum Partai NasDem Bapak Surya Paloh," jawab Joice.

"Beliau tahu tidak tentang aktivitas Garnita ini?" tanya Djameludin.

"Tahu, Bapak," jawab Joice.

"Tahu seperti apa? Saudara melaporkan?" cecar Djameludin.

"Tidak selalu, tapi iya melaporkan, dan karena di setiap kegiatan itu di Partai NasDem memiliki sosial media dan juga website dan itu pasti diupload di website itu," jelas Joice.

Joice menyebut, laporan ke Surya Paloh disampaikan lewat tatap muka (face-to-face).

"Yang Saudara laporkan itu terkait apa kepada ketua umum Saudara, Pak Surya Paloh?" tanya Djameludin.

"Kami melaporkan kegiatan-kegiatan baik yang karena sifatnya tidak rutin, maka itu kami rangkum biasanya, Bapak. Jadi, kami rangkum apa-apa saja kegiatan yang sudah-sudah dilakukan dan yang akan rencana kami lakukan ke depan," jawab Joice.

"Terkait dengan laporan kepada Pak Surya Paloh itu, itu di forum resmi atau hanya face-to-face seperti itu?" tanya Djameludin.

"Tidak di forum resmi, di Gedung Partai NasDem, tapi juga face-to-face," jawab Joice.

"Hanya Saudara dan Pak Surya Paloh aja?" tanya Djameludin.

"Tidak, tidak, ada beberapa orang yang lain juga," imbuhi Joice.

Joice menyebut, laporan kegiatan pembagian sembako dan telur hingga sapi kurban menggunakan dana

Kementan itu direspons positif oleh Surya Paloh.

"Baik. Saudara menyebutkan bahwa terkait dengan [pembagian] hewan kurban, dengan sembako, dengan telur, itu ada bantuan dari Kementan, menyebut itu atau tidak?" tanya Djameludin.

"Kepada Pak Surya Paloh?" Joice memastikan pertanyaan Djameludin.

"Iya," jawab Djameludin.

"Iya," timpal Joice.

"Bagaimana persis Saudara, bahasa persisnya pada saat Saudara melaporkan itu?" cecar Djameludin.

"Izin melaporkan, Bapak, bahwa yang dalam 3 bulan terakhir ini sudah ada kegiatan A B C D, termasuk dari pembagian sembako, kemudian ada idul kurban, dan sebagainya, itu semua bantuan yang berasal dari Kementan," ucap Joice menirukan pernyataan yang disampaikannya ke Surya Paloh.

"Terus apa tanggapan Beliau?" tanya Djameludin.

"Baik, bagus, jalankan," terang Joice menirukan respons Surya Paloh.

"Baik, bagus, jalankan?" tanya Djameludin mengkonfirmasi.

"Iya," pungkasi Joice.

Belum ada tanggapan dari Surya Paloh terkait dengan namanya disebut dalam persidangan itu.

KPK: SYL Harus Kembalikan Rp2 M

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan uang yang harus dikembalikan keluarga Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 ke negara kurang lebih sekitar Rp2 miliar.

"Total yang harus dikembalikan oleh keluarga SYL kurang lebih Rp2 miliar dari seluruhnya yang berkaitan dengan kasus SYL Rp44 miliar," kata Meyer Simanjuntak Jaksa KPK saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Meyer mengatakan uang negara

yang telah dinikmati keluarga SYL tersebut bisa dikembalikan sesegera mungkin sebelum tuntutan kepada SYL dibacakan, agar bisa menjadi bahan pertimbangan apakah dapat meringankan tuntutan.

Ia menuturkan selama persidangan, terdapat perbedaan persepsi antara para pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dengan keluarga SYL.

Adapun dalam sidang pemeriksaan saksi, para pejabat Kementan mengaku kebutuhan uang untuk keluarga SYL berasal dari permintaan dan paksaan, sedangkan keluarga SYL berdalih uang tersebut diterima berdasarkan tawaran para pejabat Kementan.

"Nanti kami buktikan mengenai hal ini di pembacaan tuntutan. Yang terpenting, mudah-mudahan keuangan negara bisa segera dikembalikan sehingga keuangan negara bisa pulih dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya," ucap dia.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, Kemal Redindo anak SYL, mengaku siap mengembalikan uang Kementerian Pertanian (Kementan) yang ia pakai dan nikmati, baik dari korupsi anggaran Kementan maupun hasil pemerasan SYL.

"Saya siap mengembalikan," kata Dindo sapaan akrabnya.

Dindo mengatakan pengembalian uang tersebut merupakan permintaan dirinya secara pribadi dan belum ada penawaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan uang yang dinikmati dirinya saat diperiksa oleh Komisi Antirasuah itu.

Dalam beberapa sidang pemeriksaan saksi sebelumnya, terungkap bahwa Dindo merupakan salah satu anggota keluarga SYL yang menikmati hasil korupsi dan pemerasan dari ayahnya.

Dindo disebutkan antara lain menggunakan uang Kementan untuk renovasi kamar, membeli aksesoris mobil, hingga tiket pesawat. Khusus tiket pesawat, Dindo, dalam sidang pemeriksaan saksi, sempat mengaku terbiasa menikmati fasilitas tersebut dari uang Kementan.

Selain Dindo, dalam sidang pemeriksaan saksi terungkap pula Ayun Sri Harahap; istri SYL, Indira Chunda Thita; anak SYL, dan Andi Tenri Bilang (Bibie); cucu SYL, juga pernah menikmati aliran uang haram dari SYL tersebut dalam jumlah yang fantastis.

Dalam kasus tersebut, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. (wis,tro,ant/dya)

JAKARTA - Mantan Staf Khusus Menteri Pertanian sekaligus Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai NasDem, Joice Triatman mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengetahui adanya pendanaan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dalam setiap kegiatan Garda Wanita (Garnita) Malahayati. Hal itu diungkapkannya dalam persidangan kasus pemerasan terhadap eselon satu di Kementan oleh bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo alias SYL yang digelar Rabu (29/5/2024).

"Kami melaporkan kegiatan (Garnita) karena sifatnya tidak rutin, maka kami rangkum apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan rencana kami lakukan ke depan," kata Joice di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat.

Dalam kesaksiannya, Joice mengaku mendapat perintah dari SYL untuk berkoordinasi dengan mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyo dalam menjalankan program bagi-bagi paket sembako ke sejumlah provinsi, di antaranya Lampung dan Sumatera Selatan. Joice berkata pembagian sembako yang dilakukan murni karena kebaikan dan bentuk kehadiran partai di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, Joice mengaku sebelum